

# STRATEGI PERCEPATAN PEMULIHAN KONDISI EKONOMI HUNIAN TETAP (HUNTAP) KORBAN BANJIR LAHAR DINGIN DI KABUPATEN MAGELANG

Oleh:  
Joko Pariyono dan Tjihno Windryanto

## **Abstract**

*This is the result of research that goes as far as the strategy for accelerating economic recovery in residential occupants and equipment (Huntap) Cold Lava Flood victims who were in Magelang District according to the preference of the victim. The method used in this research is qualitative descriptive analysis of findings that describe qualitative data. The results of this study indicate that the strategy of accelerating the economic recovery Huntap in Magelang District by the Government as a whole has not run optimally in accordance with the specified program. Some of the things that need attention include residential community capacity is not sufficient, and the unavailability of adequate facilities and infrastructure as a permanent residence, as well as the location is considered too far away from workplaces inmates Merapi eruption victims. The lack of facilities provided by the local government in supporting economic recovery and local businesses in Residential Fixed (Huntap), making residents less interest to occupy the Huntap. It also supported the establishment of a reference group (group chaperone) is not optimal, the business community's participation in the Community Recovery Committee still little sums, the lack of support and promotion of the economic viability of the affected communities as well as the unavailability of the accessibility of information and services economic recovery.*

*Keywords: Strategy, recovery, economy, Huntap*

## **Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (*Level III*) pada 21 Oktober 2010. Sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (*Level III*) menjadi "Awat" (*Level IV*), dan pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama, dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di lereng Gunung Merapi, termasuk daerah yang terkena dampak erupsi tersebut yang berupa banjir lahar dingin yang volumenya sangat tinggi dan merusak lingkungan termasuk hunian tempat tinggal maupun lahan pertanian maupun tempat ternak sebagai tumpuan perekonomian masyarakat setempat. Kondisi ini sudah barang tentu membuat masyarakat merasa kehilangan ladang untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari 12 sungai berhulu di Gunung Merapi delapan di antaranya melewati wilayah Kabupaten Magelang. Di DAS Kali Putih aliran lahar mengubur empat desa yakni Desa Jumoyo, Seloboro dan Sirahan yang berada di Kecamatan Salam serta Desa Plosogede di Kecamatan Ngluwar.

Sektor yang paling parah dihantam oleh erupsi Merapi tahun 2010 dan lahar dingin di Kabupaten Magelang adalah sektor ekonomi. Perekonomian masyarakat lumpuh. Kerugian akibat erupsi dan banjir lahar dingin mencapai 1,7 triliun. Kehidupan korban lahar dingin di Kabupaten Magelang tampak memprihatinkan. 3 bulan tinggal di pengungsian dan 7 bulan di Huntara sebagian besar korban tidak memiliki kesibukan yang berarti dan penghasilan layaknya. Bagi warga yang tergolong usia produktif yang masih kuat fisik banyak berusaha alih profesi dari profesi awal sebagai peternak maupun petani menjadi tenaga kerja di beberapa perusahaan. Sedangkan para wanita dan warga yang berusia lanjut mengalami kehilangan lapangan pekerjaan yang sebagian dari mereka dulunya pemilik *home industry* pengolahan makanan, belum mendapatkan ganti lapangan pekerjaan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Hal-hal seperti inilah yang membuat warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) enggan cepat menempati rumah baru sebagai Huntap yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Magelang sebagai dampak sekunder Erupsi Merapi serta akibat dari bencana Lahar Dingin pada tahun 2011 tersebut, maka dibutuhkan sebuah metode penanggulangan

bencana khususnya strategi percepatan pemulihan ekonomi hantap yang efektif, tepat sasaran dan cepat dalam rangka mengembalikan daya guna masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Magelang. Strategi percepatan ekonomi dilakukan berdasarkan sudut pandang para korban yang sekarang ini menjadi penghuni Huntara agar perekonomian warga korban yang sempat terpuruk kembali bangkit lagi dengan cepat dan tepat sesuai dengan preferensi korban.

## **Kajian Literatur**

### **Dampak Ekonomi Pasca Bencana**

Berbagai bencana yang terjadi baik bencana alam maupun bencana non alam pada gilirannya menimbulkan berbagai dampak sosial. Dampak sosial yang terjadi ada yang berpengaruh dalam waktu yang relative singkat, namun ada juga yang berpengaruh ke jangka waktu yang jauh kedepan, hingga melewati beberapa generasi. Realita menunjukkan bahwa dampak dari sesuatu kejadian anantara tempat satu dengan yang lain mengalami perbedaan waktu. Hal ini tergantung kondisi lingkungan dan karakter dari masing-masing masyarakat.

Konsep dampak secara etimologis dapat diartikan sebagai akibat terjadinya sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai sesuatu yang dimungkinkan sangat mendatangkan akibat, atau sebagai sebab yang membuat terjadinya sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dampak akan lebih tepat terjadinya sesuatu hal yang disebabkan adanya suatu faktor tertentu. Secara lebih mendalam tentang dampak ini, penulis akan menguraikan sesuatu yang menjadi dampak, salah satunya dari Emergency Management Australia (EMA) yang menyatakan bahwa kerusakan fisik adalah dampak ekonomi yang paling terlihat dari bencana. Namun, dampak yang kurang terlihat seperti pendapatan hilang, melalui ketidakmampuan untuk melanjutkan usaha, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dampak bencana sering berlangsung

lebih lama dari kerusakan fisik (misalnya, kebangkrutan dan penutupan bisnis). Pada konteks selanjutnya EMA menegaskan bahwa dampak dapat berupa dampak yang berwujud yang bisa dihitung dengan pasti dan dampak yang tidak berwujud yang tidak dapat dihitung. Pada bagian selanjutnya diungkapkan bahwa dampak yang tidak langsung akan menimbulkan konsekuensi seperti Dampak Ekonomi langsung, dan Dampak Ekonomi tidak langsung.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dampak itu merupakan akibat terjadinya sesuatu yang ditimbulkan oleh satu atau lebih faktor penentu, sedangkan dampak ekonomi pasca bencana lebih menekankan akibat terjadinya erupsi Merapi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam bidang ekonomi masyarakat.

### **Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana**

Secara umum, maksud dari pemulihan ekonomi Pasca bencana dapat diartikan proses kembalinya situasi atau keadaan ekonomi masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana alam. Pembahasan konsep pemulihan lebih jauh, penulis akan mengemukakan beberapa konsep antara lain: Haas, Kates dan Bowden mendeskripsikan: Definisi awal pemulihan menekankan bahwa pemulihan yang dapat diprediksi terdiri dari bagian yang dapat diidentifikasi terjadi secara berurutan, pilihan dan keputusan ditentukan oleh nilai dan hasil (misalnya, jalur untuk pemulihan) yang ditekan kembali ke kondisi normal atau penggabungan tindakan yang telah menjadi lebih baru yang terkait dengan reduksi keberlanjutan kerentanan di masa depan (pasca-bencana mitigasi), ekuitas, dan kemudahan. (Handbook of Disaster Research: 2007,xxvi). Sementara itu Damon P. Coppola dalam bukunya mendefinisikan: Pemulihan bencana merupakan fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, dimana setiap komunitas, keluarga dan memperbaiki individu, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika bencana terjadi. Idealnya, mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana

tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang.(Introduction to International Disaster Management:2007, 299).

Bagian yang paling penting dalam upaya pemulihan ini termasuk di dalamnya adalah rekonstruksi fisik dari lingkungan. Secara terinci dapat diilustrasikan meliputi membangun dan memperbaiki bangunan hunian maupun fasilitas lain yang rusak, perbaikan kawasan ekonomi yang rusak seperti industri rumah tangga yang telah berjalan sebelum terjadinya erupsi Merapi. Bentuk tindakan dari pemulihan ini dapat berupa: 1) Komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak erupsi Merapi, 2) Penyediaan perumahan sementara atau tempat berteduh jangka panjang, 3) Pengkajian kesurakan dan kebutuhan, 4) Pembongkaran struktur yang rusak, 5) Pembersihan, penghapusan dan pembuangan puing-puing, 6) Rehabilitasi insfrastruktur, 7) Pemeiksaan kerusakan struktur, 8) Perbaikan kerusakan struktur, 9) Konstruksi Baru, 10) Program rehabilitasi sosial, 11) Penciptaan kesempatan kerja, 12) penggantian kerugian property, 13) Rehabilitasi yang terluka, dan yang terakhir 14) Pengkajian kembali Manajemen risiko. (Coppola, 2007:299)

Dengan mendasarkan pada beberapa konsep teraebut, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemulihan Pasca Bencana merupakan suatu perubahan kembalinya kondisi ekonomi setelah terkena dampak erupsi Merapi. Kesimpulan ini nampaknya sangat sederhna, namun bila ikaji lebih mendalam akan berpengaruh pada perubahan lingkungan yang menyeluruh. Hal ini mengandung arti pula bahwa pemulihan ekonomi ini harus dilakukan secara terencana dan dikelola dengan sistem manajemen modern, agar membuahkan hjasil sesuai dengan yang diharapkan.

### **Strategi Percepatan**

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* dan *strategia*. Kata strategi dalam kegiatan berperang bukanlah suatu yang asing karena strategi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pemakaian sumberdaya di dalam kendala iklim kompetitif agar seperangkat

sasaran dapat dipakai. Strategi sendiri digunakan dalam dua pengertian yaitu untuk menunjukkan kepada apa yang mau dilakukan oleh suatu organisasi secara aktif atau untuk menggambarkan reaksi positifnya terhadap perubahan lingkungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan Gerry Johnson dan Kevan Scholes dalam J. Hutabarat dan M. Husein mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Konsep strategi yang lainnya dikemukakan oleh Irwin Mc Graw-Hill dalam John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr<sup>1</sup> mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat bahwa strategi merupakan serangkaian cara yang disusun secara cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya.

### **Strategi Percepatan Pemulihan Kondisi Ekonomi**

Dengan mendasarkan pada variabel yang penulis ajukan, maka konsep dari variabel Strategi Percepatan Pemulihan Kondisi Ekonomi diartikan sebagai serangkaian cara yang disusun secara cermat sehingga tujuan dan sasaran memperbaiki, merekonstruksi atau mendapatkan kembali kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan yang terpuruk akibat bencana supaya lebih cepat dapat tercapai. Secara operasional variabel Strategi percepatan pemulihan akan penulis ukur dari beberapa indikator, meliputi:

1. Kapasitas pemukiman masyarakat yang terkena dampak langsung bencana.

2. Tingkat pengembangan organisasi dan jaringan sesuai aktivasi sistem yang tersedia dalam masyarakat.
3. Kuantitas penyediaan hibah pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan bisnis lokal.
4. Tingkat pemberdayaan penduduk lokal dalam rangka membeli sumber daya dan layanan local.
5. Tingkat pembentukan kelompok referensi (kelompok pendamping) yang merupakan perwakilan dari bisnis, industri dan karyawan kelompok.
6. Tingkat partisipasi masyarakat bisnis dalam Komite Pemulihan Masyarakat.
7. Tingkat dukungan dan promosi kelangsungan hidup ekonomi masyarakat yang terkena dampak.
8. Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas informasi dan layanan pemulihan ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan studi Pustaka. Keempat metode ini digunakan untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif sampling dengan mengambil responden 10 orang yang terdiri dari komponen Kepala BPBD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Desa Hunian tetap dan Koordinator Hunian Tetap di Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis diskriptif kualitatif. Diskriptif lebih mengacu pada cara menggambarkan “apa adanya” dengan data yang diperoleh dari lapangan tentang suatu variable, gejala atau keadaan yang membuat penafsiran menghubungkan atau mengkaitkan satu variable lainnya dan dikaitkan dengan teori yang ada. Pada akhirnya mengambil

kesimpulan untuk menyusun rekomendasi atau saran yang diajukan untuk perbaikan ke depan.

## Pembahasan

Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

Dari 372 desa tersebut yang terkena dampak dari lahar hujan antara lain, Desa Krogowangan, Desa Gondowangi di Kecamatan Sawangan, Desa Dukun, Desa Banyudono Di Kecamatan Dukun, Desa Gondosuli, Desa Tamanagung, Desa Adikarto di Kecamatan Muntilan, Desa Gulon, Desa Jumoyo, Desa Seloboro, Desa Sirahan di Kecamatan Salam, Desa Blongkeng di Kecamatan Ngluwar, dan Desa Ngrajek, Desa Progowati di Kecamatan Mungkid. Sedangkan data kerusakan perumahan sebagai akibat banjir lahar dampak erupsi Merapi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel Data kerusakan perumahan penduduk akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Rumah	Hanyut	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Muntilan	Muntilan	6	1		4	1
2	Adikarto	Muntilan	40	16	24		
3	Gondosuli	Muntilan	5		2		3
4	Tamanagung	Muntilan	34	3	18	7	6

5	Jumoyo	Salam	189	60	99	16	14
6	Sirahan	Salam	289	29	127	48	85
7	Seloboro	Salam	8		4	4	
8	Sucen	Salam	5		4		1
9	Gulon	Salam	12		12		
10	Ngrajek	Mungkid	75	7	16	45	7
11	Progowati	Mungkid	2	2			
12	Srumbung	Srumbung	2		2		
13	Blongkeng	Ngluwar	28	8	10	10	
14	Gondowangi	Sawangan	6	2	4		
15	Krogowanan	Sawangan	11				11
16	Banyubiru	Dukun	5	1	4		
17	Banyudono	Dukun	21			1	20
18	Dukun	Dukun	8				8
	<b>Total</b>		<b>746</b>	<b>129</b>	<b>326</b>	<b>135</b>	<b>156</b>

*Sumber : Data BPBD Kabupaten Magelang*

Berdasarkan data tersebut, maka kondisi yang paling parah kerusakannya ada di desa Sirahan sebanyak 289 rumah, disusul desa Jumoyo sebanyak 189 rumah. Sedangkan kerusakan yang paling sedikit itu di desa Srumbung sebanyak 2 rumah. Kerusakan rumah yang tergolong berat sebanyak 326 rumah yang terbagi ke dalam 18 desa, sedangkan dari jumlah tersebut desa Sirahan yang tergolong paling banyak kerusakan beratnya. Kerusakan sedang sebanyak 135 rumah, sedangkan kerusakan ringan sebanyak 156 rumah.

Pemerintah telah berupaya mengatasi warga yang kehilangan tempat tinggal, dengan membangun hunian tetap yang disebut dengan Huntap di beberapa tempat yang lokasinya memang cukup jauh dari tempat tinggal semula namun lebih aman dari bencana lahar dingin. Maksud dari pembangunan hunian tetap tersebut untuk memberikan tempat yang layak bagi korban banjir yang rumahnya tidak dapat ditempati lagi karena terkena

banjir lahar dingin dampak dari erupsi Merapi. Pembangunan Hunian Tetap dimulai sejak peletakan batu pertama tepatnya hari Senin tanggal 23 Juli 2012.

Program pembangunan rumah huntap tersebut mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2012 yang tepatnya pada hari ke-3 bulan ramadhan 1433 H oleh bupati Magelang Ir. Singgih Sanyoto. Lokasi pembangunan hunian tetap tersebut terletak di Dusun Judah, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Magelang, menggunakan sistem tersendiri yang disebut dengan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Masyarakat (Rekompak) yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana. Dalam sistem ini diharapkan warga yang akan menempati rumah tersebut ikut dilibatkan dalam proses pembangunannya. arena Program Rekompak merupakan program yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dengan harapan dapat memunculkan rasa memiliki bagi calon penghuni rumah hunian tetap tersebut.

Untuk memberikan ilustrasi yang lengkap, maka berikut ini penulis akan menganalisis maasing-masing indikator tersebut berdasarkan hasil temuan yang dilakukan selama penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Kapasitas pemukiman masyarakat yang terkena dampak langsung bencana.

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap penduduk, dalam percepatan pemulihan kondisi ekonomi, hunian menjadi salah satu hal yang penting. Pada kenyataan, proses pemulihan rumah masyarakat merupakan bukti kepedulian Pemerintah kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan sebagai dampak dari banjir lahar dingin. Upaya Pemerintah membangun rumah tempat hunian tetap bagi warga yang terkena korban banjir lahar dingin tersebut direalissikan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor:

188.45/418/KEP/63/2012, yang isinya bahwa penerima manfaat BDR adalah sejumlah 785 KK. Realitanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sampai dengan akhir bulan Juni 2013 dari 785 KK baru yang harus mendapatkan rumah, baru 406 rumah berhasil dibangun itupun terletak di 9 lokasi hunian tetap yang mengelompok dan lokasi-lokasi mandiri perorangan yang tersebar. Dari 406 rumah yang dibangun tersebut, 30 rumah masih belum dikerjakan, 33 rumah diantaranya masih dalam proses pembangunan dan baru 162 rumah yang listriknya menyala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realitanya Pemerintah menghadapi kendala yang cukup berarti, yang mengakibatkan lambatnya pembangunan rumah hunian tetap tersebut selesai tepat pada waktunya. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: a) Lokasi tempat hunian tetap tersebut jauh dari pusat kota yang menyebabkan pengadaan sarana listrik dan penyediaan air minum sulit untuk dilaksanakan, b) Perubahan harga lahan yang mendadak. Pada awalnya harga tanah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yaitu Rp. 70.000/m<sup>2</sup>, namun dalam waktu kurang dari 2 hari tanah tersebut sudah melambung menjadi Rp. 125.000/m<sup>2</sup>. Perubahan harga tersebut kemungkinan dikarenakan pemilik lahan menganggap bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari proyek pemerintah dengan dana besar dan bukan bagi masyarakat. c) Tanah yang disediakan untuk dibangun kondisinya keras dan tandus, sehingga mengalami kesulitan bagi pekerja untuk menyelesaikan bangunan rumah tersebut.

2. Tingkat pengembangan organisasi dan jaringan sesuai aktivasi sistem yang tersedia dalam masyarakat.

Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Dalam rangka meningkatkan aspirasi

masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan diperlukan adanya lembaga kemasyarakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada yang meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna serta Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Pengembangan organisasi dan jaringan sesuai aktivasi sistem yang tersedia dalam masyarakat untuk sementara ini cukup baik. Walaupun ada kendala dalam status kependudukan, tetapi secara umum semuanya berjalan dengan lancar. Didukung juga dari masyarakat sekitar Huntap yang menerima baik para penghuni huntap. Pembentukan lembaga-lembaga ini diharapkan agar dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan memanfaatkan para pimpinan lembaga yang terbentuk melakukan pendampingan maupun untuk urusan administratif yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Kuantitas penyediaan hibah pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan bisnis lokal.

Bencana alam dapat menyebabkan gangguan serius pada usaha dikarenakan usaha yang mungkin tidak dapat beroperasi selama bencana terjadi sampai beberapa waktu setelah bencana terjadi. Kehilangan usaha selama periode ini dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan keuangan dan dalam beberapa kasus bisnis, usaha atau bisnis mungkin tidak berjalan kembali. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan langkah pemulihan ekonomi dengan memberikan hibah dengan beberapa jenis terutama pada saat warga masih menentap di hunian semestara. Hibah tersebut dapat berupa bantuan ternak, modal maupun bahan dasar untuk memproduksi suatu barang dengan maksud dapat menambah penghasilan warga di hunian sementara. Setelah warga

menempati tempat baru di hunian tetap, justru hibah itu tidak lagi didapatkan, sehingga warga mengalami kesulitan untuk membangun kembali usaha yang telah dirintis sebelumnya. Hibah atau bantuan pemerintah yang bersifat kurang berkelanjutan ini yang menyebabkan enggan warga untuk tinggal dan menempati hunian baru yaitu hunian tetap. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keengganan warga yang terkena musibah untuk menempati rumah hunian tetap yang baru.

4. Tingkat pemberdayaan penduduk lokal dalam rangka membeli sumber daya dan layanan lokal.

Pemberdayaan masyarakat khususnya bagi korban bencana dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberi keterampilan dalam bentuk pelatihan teknik menjadi tukang, maupun pengembangan industri Rumah Tangga. Harapan dari Pemerintah agar terjadi proses imbal balik agar calon penghuni dapat terlibat dalam proses pembangunan rumah sdbagai huntap ini. Adapun maksud dan tujuan memberi keterampilan sebagai tukang batu bagi korban tersebut, agar rumah yang dibangun cepat selesai. Keterlibatan masyarakat tersebut berupa calon pemilik ikut terlibat membangun rumah miliknya sendiri, sehingga akan menumbuhkan rasa *handarbeni* di kemudian hari. Selain itu mereka mendapat upah sebagai imbal balik dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam pembangunan rumah huntap tersebut, Pemerintah menunjuk Rekompak untuk melakukan pendampingan yang berupa pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk setiap pembangunan rumah huntap tersebut. Ditambah lagi proses pembangunan BDR akan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, lebih cepat selesai karena tukang batu diawasi oleh calon pemilik, serta akan terjalin komunikasi dan interaksi yang baik antara calon

penghuni huntap dengan masyarakat sekitar. Kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah adalah tidak setiap orang memiliki keterampilan sebagai tukang, pada akhirnya rumah yang mereka bangun hasilnya tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Tingkat pembentukan kelompok referensi (kelompok pendamping) yang merupakan perwakilan dari bisnis, industri dan karyawan kelompok.

Masyarakat yang menjadi korban bencana dikategorikan sebagai kelompok rentan dan tidak berdaya karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pembentukan kelompok referensi (kelompok pendamping) yang merupakan perwakilan dari bisnis, industri dan karyawan kelompok dalam proses percepatan pemulihan kondisi ekonomi huntap sangat diperlukan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi ekonomi tersebut dilakukan dengan cara membentuk kelompok pendamping di Kabupaten Magelang, akan tetapi dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tersebut masih disera kurang optimal. Kekurang optimalnya sistem pendampingan bagi warga huntap ini menjadikan kurang berkembangnya kegiatan kelompok usaha dari masyarakat itu sendiri, hal ini tampak ketika masih didampingi unit usaha masih bisa berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi ketika program pendampingan sudah selesai kelompok usaha mengalami kemacetan karena usaha tidak berjalan. Hal ini tampak jiwa kemandirian dan wirausaha dari masyarakat masih rendah.

6. Tingkat partisipasi masyarakat bisnis dalam Komite Pemulihan Masyarakat. Upaya Pemerintah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi Rumah Tangga berupa pemberian keterampilan dan modal usaha, agar warga penghuni dapat mengembangkan usaha industri rumah tangga

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi rumah tangga memang mengalami kesulitan, sehingga jumlahnya tidak bisa memenuhi target seperti yang diharapkan. Pada realitanya masyarakat sekitar belum dapat membantu pemulihan ekonomi warga huntap, hal ini disebabkan karena ekonomi masyarakat sekitar huntap sendiri juga masih lemah. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya perekonomian rakyat tersebut berupa lokasi yang sangat jauh dari kota, di samping itu juga belum berkembangnya ekonomi masyarakat sekitarnya yang menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat sekitar huntap tersebut. Sementara ini tumpuan hasil penjualan masih untuk kalangan warga sekitar lokasi huntap saja, dan belum berkembang dan meluas untuk kepentingan masyarakat luar desa atau masyarakat perkotaan. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah memandang perlu adanya pengembangan usaha bersama antara masyarakat setempat dengan warga pendatang baru yang tinggal di huntap. Dengan demikian usaha bersama yang bisa mensinergikan antara penghuni huntap dengan masyarakat sekitar huntap. Sehingga akan terjalin komunikasi yang baik juga akan terjadi saling support antar penduduk.

7. Tingkat dukungan dan promosi kelangsungan hidup ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pendampingan kelompok usaha bersama masih seputar pada bagaimana memproduksi barang saja. Sedangkan teknis pemasaran atau teknik mempromosikan barang belum diberikan secara optimal pada saat pemberian pelatihan. Pembekalan yang masih terbatas ini belum lengkap dan sempurna seperti layaknya seorang pengusaha. Sebagai dampaknya bahwa pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat hanya terbatas pada kepentingan masyarakat setempat saja, dan belum sampai pada

pemasaran ke luar daerah. Promosi merupakan salah satu variabel *marketing mix* yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai “proses berlanjut” karena dapat menumbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Lemahnya kemampuan warga dalam melakukan promosi tersebut menyebabkan penjualan produk rumah tangga tersebut kurang luas, karena hanya untuk konsumsi masyarakat sekitar. Pada sisi lain kemampuan warga untuk melakukan promosi ke luar desa masih lemah, yang menyebabkan produksi tidak berkembang yang pada akhirnya banyak warga beralih mata pencahariannya untuk menjadi tenaga kerja pada perusahaan maupun toko-toko di kota.

8. Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas informasi dan layanan pemulihan ekonomi.

Layanan Informasi merupakan sarana penyampaian informasi ke publik dengan tepat. Pengembangan jaringan layanan informasi akan memengaruhi kemantapan warga untuk tinggal dan menempati di hantap. Layanan Informasi berfungsi sebagai sarana penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketersediaan dan aksesibilitas informasi dan layanan pemulihan ekonomi hantap masih belum maksimal. Sehingga beberapa informasi yang diberikan kepada publik kurang sesuai dengan apa yang ada di hantap. Layanan informasi ini menerima pengaduan dan keluhan warga masyarakat, namun peran pemberian layanan kurang efektif, karena banyak keluhan warga kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai gambaran komplain warga hantap mengenai sarana penerangan, ternyata belum ada tanggapan yang baik, sehingga warga mengalami kurang puas atas jawaban yang diberikan. Kelemahan yang dihadapi oleh aparat lokasi yang cukup jauh dan minimnya fasilitas listrik

maupun alat komunikasi menyebabkan pengaduan yang disampaikan warga tidak dapat ditanggapi dengan cepat.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan telah dianalisis data yang diperoleh dari penelitian di 9 Huntap yang berada di Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwa strategi percepatan pemulihan kondisi ekonomi Huntap di Kabupaten Magelang dapat dikatakan belum berjalan secara optimal sesuai dengan rencana semula. Dari hasil analisis 8 indikator penelitian dapat dicermati bahwa belum semua indikator dapat dicapai dengan optimal, terbukti masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain kapasitas pemukiman masyarakat yang belum mencukupi dan belum terbangun semua, kuantitas penyediaan hibah pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan bisnis lokal di huntap belum ada, pembentukan kelompok referensi (kelompok pendamping) ada tapi belum optimal, partisipasi masyarakat bisnis dalam Komite Pemulihan Masyarakat masih sedikit jumlahnya, belum adanya dukungan dan promosi kelangsungan hidup ekonomi masyarakat yang terkena dampak serta belum tersedianya aksesibilitas informasi dan layanan pemulihan ekonomi. Merujuk dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kekeurangan-kekurangan tersebut mempengaruhi warga yang akan tinggal di huntap kurang merespon tawaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

### **Rekomendasi**

Untuk dapat meningkatkan perekonomian huntap di kabupaten magelang, peneliti menyarankan berbagai usulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, tentang ketersediaan huntap yang jumlahnya masih belum mencukupi karena keterbatasan

lahan maka perlu adanya koordinasi dengan Kepala Desa-Kepala Desa di Kabupaten Magelang tentang pengadaan lahan Huntap.

2. Pemerintah melakukan pendekatan terhadap wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR RI ataupun DPRD Kabupaten Magelang demi mendapatkan anggaran pemulihan bencana yang lebih besar dari APBN dan APBD, sehingga proses relokasi tidak lagi tersendat karena masalah dana.
3. Melakukan pendekatan terhadap para korban dengan cara duduk bersama kembali, berembuk dan berdiskusi guna mencari suatu pemecahan masalah yang solutif agar mereka mau dipindahkan, sehingga mempercepat proses percepatan pemulihan kondisi ekonomi.
4. Mempercepat proses pemberian bantuan atau hibah pemulihan ekonomi, memperbaiki serta melengkapi fasilitas huntap bagi korban yang telah menempati huntap sehingga dapat menarik korban yang belum tinggal di huntap tapi telah memiliki Huntap. Di samping itu juga Pemerintah memberikan pendampingan dalam bidang pemasaran hasil produk dari warga huntap agar hasil produksinya dapat laku di pasar luar huntap.
5. Pemerintah menghidupkan serta membentuk kelompok-kelompok usaha bersama kembali seperti ketika di Huntara dengan pendampingan dari tenaga ahli, sukarelawan atau pengusaha-pengusaha sampai dengan usaha berjalan lancar mulai dari produksi sampai pemasaran. Bentuk pendampingan hendaknya dibekali materi sistem pemasaran barang dan sistem pengemasan produksi yang layak jual ke daerah lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

BNPB, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2013*, 2011

Coppola, D. P, *Introduction to International Disaster Management*, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007

Emergency Management Australia, *Economic and Financial Aspects of Disaster Recovery*, Australia: Pirion, 2002

Rodriguez H., Quarantelli E. L. & Dynes R. R. , *Handbook of Disaster Research*, New York: Springer, 2007

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2001

Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indoneia Lengkap*, Semarang: Bintang Jaya, 2007

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 2 Mei 2013 pukul 20.13 WIB

<http://kuliahpgsd.blogspot.com/2012/01/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html>, diakses 2 Mei 2013 pukul 20.16 WIB.